

LAPORAN
RENCANA KINERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025



Jl. Gajah mada No. 10 kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima
Nomor Tlpn : 0374-43214

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Rencana Kerja (RENJA) yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2025 ini memuat program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan juga prakiraan maju tahun berikutnya. Dengan kata lain, dokumen ini memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, Juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Melalui Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi tolak ukur bagi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi, Misi dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan laporan ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini, kami mengucapkan terimakasih atas sumbangan pikirannya.

Kota Bima, 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Bima,



U. I. ALI SHUKARSA, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
TABEL - TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	20
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	21
2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	32
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V. PENUTUP	46

TABEL - TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD	15
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	20
Tabel 2.3 Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP	22
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan	31
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran	34
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran	35
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama PD	35
Tabel 4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan	37
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD, saat ini disebut Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Selain itu juga untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2024. Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Kota Bima sebagai salah satu Daerah Otonom di wilayah Provinsi NTB sesuai Undang Undang nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya harus berupaya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah sebaik – baiknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat semakin berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat. Maka untuk mendukung kebijakan daerah Kota Bima serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perijinan dibentuklah SKPD Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kota Bima yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan perijinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4

tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima.

Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak perubahan pada sistem manajemen administrasi yang ada, dimana pemerintah Kota Bima diharapkan melaksanakan pembenahan pada aspek refitalisasi organisasi kelembagaan dengan cara menata kembali struktur organisasi secara terus menerus yang efektif dan efisien. Selain itu juga melakukan peningkatan profesionalisme aparatur untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang mumpuni sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Kota Bima sejak berdirinya hingga akhir tahun 2024 mengarah pada aktifitas perkotaan yang berfokus pada pelayanan jasa dan aktifitas non pertanian lainnya, hal ini ditandai adanya alih fungsi lahan menjadi sektor usaha jasa dan pembangunan gedung – gedung kantor dan perumahan, tentu saja perkembangan ini harus diikuti dengan perubahan arah kebijakan pembangunan untuk mengoptimalkan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang diikuti dengan pengembangan aktifitas ekonomi lokal yang produktif. Pengembangan tersebut akan merambah pada peningkatan aktifitas.

Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kota Bima di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Import
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara elektronik dibidang Perdagangan.
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 - 2028;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan.
17. Peraturan Daerah kota Bima Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kota bima
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis risiko
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan berbasis risiko kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Tata Kerja Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapaun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima :

1. **Tujuan Umum** : Untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan Program dan kegiatan bidang Penanaman Modal dan Perizinan tahun 2024 sebagai kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi SKPD serta Visi dan Misi Kota Bima.
2. **Tujuan Khusus** :
 - a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan PTSP dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima selama 1 (satu) tahun .
 - b. Merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2025, SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Jenis pelayanan (SPM) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan serta Investasi Penanaman Modal dalam Negeri.
 - c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum dalam penyusunan Renja PD agar substansi yang dibahas pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa subbab meliputi :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan Renja PD dengan RKPD, Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, permen, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan walikota dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah sesuai RPD Kota Bima 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi indikator program/kegiatan
2. Faktor-faktor penyebab pemenuhan target (memenuhi/tidak memenuhi/melebihi)
3. Implikasi yang timbul terhadap target pencapaian program
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
5. Tampilkan Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan (dalam Permendagri 86 tahun 2017 di halaman 402)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
2. Mengidentifikasi semua indikator PD didasarkan pada indikator RPD, RENSTRA PD, IKK, SPM, NSPK dan SDGs yang belum tercapai
3. Tampilkan tabel T-C.30 pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (dalam permendagri 86 tahun 2017 di halaman 403). Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian atas tujuan dan sasaran daerah, serta capaian program dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Menguraikan proses pembagian antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
4. Tampilkan Tabel T-C.31 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bima Tahun 2024 (dalam Permendagri 86 tahun 2017 di halaman 404)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Pengusulan dari Musrenbang;
2. Pengusulan dari pokok-pokok pikiran DPRD;
3. Pengusulan dari Forum Musrenbang Tematik;
4. Saran dan masukan dari forum/lintas Perangkat Daerah;
5. Pengajuan proposal dari lembaga/badan/kelompok masyarakat kepada Walikota
6. Sajikan Tabel T-C.32 Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024 (dalam permendagri 86 tahun 2017 di halaman 405)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang belum tercapai (sesuai Renstra PD tahun 2024-2026)
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan (jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi atau kelompok sasaran, total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (unduh dari SIPD RI)

BAB V PENUTUP

Uraian Penutup antara lain :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun untuk ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang :

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan.
2. Efektifitas pencapaian sasaran.

Disamping itu juga diuraikan mengenai hal –hal yang mendukung keberhasilan dan faktor yang menghambat dan langkah – langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan kinerja untuk masa – masa yang akan datang (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain tentang realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja keluaran dan realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran.

Realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan yang tidak memenuhi target Pelayanan Penanaman Modal pada sub kegiatan

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dimana indikatornya adalah Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan target kinerja 25 orang terealisasi 2 orang dengan capaian kinerja 8 % tidak tercapainya realisasi kinerja karena sudah banyak masyarakat atau pelaku usaha yang sudah memahami dan mengerti arti penting izin usaha, baik izin lokasi yang dipergunakan untuk usaha maupun izin yang lainnya sehingga tidak ada yang melakukan pengaduan dan tidak ada konflik.

Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target yaitu pada Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan capaian kinerja 100% dan program promosi penanaman modal target 100%

Banyak program dan kegiatan yang melebihi target diatas 100 % antara lain pada program Pelayanan Penanaman Modal pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik target 1.000 pelaku usaha realisasi kinerja 2.198 pelaku usaha dengan capaian kinerja 220%. Kemudian sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal target 2000 kegiatan usaha realisasi 5211 kegiatan usaha dengan capaian kinerja sebesar 260 % demikian juga dengan Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pada sub Pengawasan Penanaman Modal target 231 kegiatan usaha realisasi 249 kegiatan usaha dengan capaian 108 %. Faktor penyebab melebihi target adalah disebabkan karena sudah banyak pelaku usaha yang sudah mengerti pentingnya izin usaha, sering adanya kegiatan Bimtek dan kegiatan turun lapangan oleh team DPMPSTP pada pelaku usaha.

Di perkiraan capaian target program dan kegiatan tahun berjalan akan mencapai rata-rata diatas 100 % dengan harapan agar masyarakat atau pelaku usaha dapat menyadari akan pentingnya izin usaha.

Adapun Faktor-faktor penyebab pemenuhan target (memenuhi/tidak memenuhi/melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas penanaman modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja. Penyebab keberhasilan yang dominan sehingga kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima mencapai target yang ditentukan atau mengalami peningkatan adalah :

1. Adanya Kemitraan dan koordinasi antara DPMPTSP dengan Dinas Teknis terkait;
2. Pelaksanaan Survey yang rutin terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha;
3. Pelaksanaan Monitoring yang intens terhadap Izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya;
4. Pelaksanaan Sosialisasi cakupan produk hukum kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perizinan kepada masyarakat pelaku usaha;
5. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup dan memadai;
6. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

Ada beberapa faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024, penyesuaian Program dan kegiatan yang sesuai dengan Kepemdagri 50 tahun 2022 Penyelerasan antara nama program dan kegiatan dari tahun yang sebelumnya dengan tahun sekarang target kinerja pada indikator sasaran atau indikator utama akan dipegaruhi oleh keadaan realisasi anggaran yang ada karena kegittannya masih dipengaruhi oleh situasi pandemi yang dirasakan yakni adanya pandemi covid-19 tahun 2019 walaupun sudah berlalu 5 tahun yang lalu namun penganggaran masih terasa dan masih berpengaruh dengan anggaran yang ada dan masih dirasakan sangat kurang dan minim untuk memajukan sarana dan prasana terkait peningkatan pelayanan publik, masih belum adanya aplikasi daerah yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik terkait kegiatan IKM masih dilakukan secara manual, yang diinginkan bisa menggunakan aplikasi mandiri atau sistem IKM online untuk masyarakat yang merasakan akan pelayanan pada DPMPTSP

dan belum bisa dikatakan PTSP sebagai pelayanan satu pintu karena dinas terkait atau teknis belum ada yang berkantor ke DPMPTSP.

Implikasi yang timbul terhadap target pencapaian program, dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Melakukan sosialisai kepada pelaku usaha (badan/perorangan) tentang aturan – aturan yang berkaitan dengan Perizinan;
2. Melakukan Pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha (badan/perorangan) yang akan berakhir masa berlaku izinnya;
3. Mendorong dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan;
4. Melakukan rapat- rapat koordinasi dengan Dinas Teknis terkait dalam hal kepengurusan pelayanan perijinan satu pintu.
5. Diharapkan bisa diberikan anggaran dan dana yang sesuai untuk sarana dan prasarana untuk meningkatkannya pelayanan publik;

Untuk lebih jelasnya dapat di sajikan Tabel 2.1 T-C.29 yang merupakan tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan Tahun 2024 (sesuai dalam Permendagri 86 tahun 2017 di halaman 402) dan menjelaskan juga tentang program, kegiatan, indikator, target, realisasi dan tingkat persentase capaian realisasi kinerja sesuai yang telah direncanakan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada tahun berjalan namun dilakukan juga pada tahun-tahun sebelumnya dari tahun n, tahun n-1 s/d tahun n-3,tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel 2.1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2..1.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.0.0.0.0.1	DINAS PENANAMAN MODAL		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0.0.0.0.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.18.0.0.0.0.1.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/ Bulan	30 orang	35 orang/ Bulan	25 orang/ Bulan	71%	35 orang/ Bulan	25 orang/ Bulan	83%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 bulan	12 Dokumen	11 Dokumen	92%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.06	Administrasi Umum	Porsentase Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	25 laporan	25 laporan	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	167%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%

2.18.0.0.0.0.1.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
2.18.0.0.0.0.1.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2.18.0.0.0.0.1.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0.0.0.0.1.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	680 Pelaku usaha	1 Dokumen	680 Pelaku usaha	1 Dokumen	100%	680 Pelaku usaha	433 Pelaku usaha	64%
2.18.0.0.0.0.1.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.0.0.0.0.1.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0.0.0.0.1.04.2.01	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1000 Pelaku usaha	1 Dokumen	1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha	1667 %	1000 Pelaku usaha	1667 Pelaku usaha	167%
2.18.0.0.0.0.1.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku usaha	1500 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha	1667 %	1000 Pelaku usaha	1667 Pelaku usaha	167%
2.18.0.0.0.0.1.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2000 Kegiatan usaha	2500 Pelaku usaha	2500 Kegiatan usaha	2500 Kegiatan usaha	4541 %	2500 Kegiatan usaha	4541 Kegiatan usaha	227%

2.18.0. 0.0.0.1. 04.2.01 .03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Orang	30 Orang	30 Orang	11 Orang	44%	30 Orang	11 Orang	44%
2.18.0. 0.0.0.1. 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 Pelaku usaha	100 Pelaku usaha	100 Pelaku usaha	100 pesen	100%	0 Pelaku usaha	110 Pelaku usaha	110%
2.18.0. 0.0.0.1. 05.2.01 .03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	0 Kegiatan usaha	0 Kegiatan usaha	0 Kegiatan usaha	0 Kegiatan	%	231 Kegiatan usaha	Kegiatan usaha	#DIV/0!
2.18.0. 0.0.0.1. 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
2.18.0. 0.0.0.1. 06.2.01 .01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas penanaman modal dan PTSP
Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya investasi dan jumlah pelaku usaha	Realisasi Investasi		Mengukur Porsentase Peningkatan Investasi	140.706.869.439	143.521.006.828	140.706.869.439	188.071.397.742	115.380.536.100	200.000.000.000	112.464.935.278	-	220.000.000.000	242.000.000.000	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		-	84,86	84,86	92,86	88,86	70,5	90,85	91,68	-	91,85	91,85	

Dalam menganalisis kinerja SKPD yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima meliputi :

1. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dan tujuan, misi dan visi.

Mulai dari penetapan Visi, Misi, Sasaran, Program sampai dengan kegiatan harus memiliki keterkaitan hubungan turunan, oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus mempunyai hubungan yang logis sehingga semua komponen dapat diukur. Kegiatan tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan bagian dari program kerja dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2024 sampai tahun 2026, Oleh karena demikian pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dalam hal ini memiliki hubungan yang sangat logis.

2. Keterkaitan antara Pencapaian Kinerja dengan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan uraian – uraian sebelumnya dari 5 Program dan 9 kegiatan tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian realisasi keuangan sebesar 90,61 % dan realisasi kinerja rata-rata mencapai diatas 100% hanya sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu tidak tercapai target hanya sebesar 16 %.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang berhasil diidentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPD tahun 2024-2026. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
12	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan

Berdasarkan tabel 2.3. permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP berdasarkan RPJMD 2018 – 2023, tetapi pada akhir tahun 2023 untuk jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah nilai invetasi berskala nasional (PMDN/PMA) dapat meningkat melalui iklim investasi dan perijinan karena adanya peraturan kemudahan dalam berusaha yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan berusaha terintegritas dengan elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Diharapkan berjalan dengan baik pada tahun berikutnya.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan terjadi perbedaan anggaran yang signifikan karna tahun 2024 ada mendirikan Mal Pelayanan Publik sehingga ada penambahan anggaran dari rancangan awal, Mal Pelayanan Publik ini akan dijadikan program unggulan atau program prioritas DPMPTSP Kota Bima.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik berjalan sejak tanggal 24 Juni 2024 dan disyahkan pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 660 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik.

Untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, pemerintah melalui Perpres 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal Pelayanan Publik (MPP) ini akan menggunakan system pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, mudah, dan akuntabel.

Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan semangat inovasi dalam mendekatkan dan mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat, berusaha mengembangkan pola pelayanan publik terintegrasi yang lebih progresif dalam memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu gedung dengan mengambil langkah pembaharuan berupa pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan suatu langkah strategis pemerintah sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Kota Bima. Mal Pelayanan Publik (MPP) mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik yang kewenangan pelayanannya pada pemerintah pusat, daerah serta BUMN/BUMD dan swasta yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bima diharapkan mampu menjawab permasalahan keterbatasan pelayanan publik yang masih melakukan pelayanan dengan PTSP, dimana model pelayanan masih terbagi antara PTSP dengan OPD penerbitan perizinan disebabkan oleh jarak dan teknologi yang digunakan. Sebagai gambarnya, Kota Bima saat ini terdapat 125 pelayanan perizinan masih tercerai berai yang masih dilakukan di masing-masing OPD sedangkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya memiliki 8 jenis pelayanan dan mengelola 21 sektor jenis pelayanan dari 16 OPD sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang cepat, tepat dan efisien.

Tantangan kedepan yang akan dihadapi dalam pelayanan publik yang ada di pulau Sumbawa umumnya dan khususnya Kota Bima adalah dan event internasional MXGP serta regional lainnya sangat membutuhkan pemikiran serius tentang model pelayanan yang memberikan kenyamanan.

Selain itu juga hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia tahun 2024 tentang penilaian kepatuhan pelayanan publik menempatkan Kota Bima dengan nilai (82,54). Hasil penilaian kepatuhan ini merupakan barometer penataan perbaikan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Bima terus berbenah meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan publik baik tingkat regional maupun nasional, terutama para investor yang akan membangun infrastruktur pendukung seperti perhotelan, sistem transportasi dan lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 T-C.31 tentang Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bima tahun 2025 (dalam permendagri 86 tahun 2017).

TABEL.2.4 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
DPMPTSP Kota Bima

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BIMA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.409.312.791,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.534.450.582,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.749.752.091,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.224.926.482,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96.865.800,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	77.311.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	16.802.100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	16.348.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9.161.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.153.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.966.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.611.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.121.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.512.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.168.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.028.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	11.170.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	9.679.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	42.475.700,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	30.980.000,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Laporan	3.235.884.021,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Laporan	3.511.582.282,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.113.281.121,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.392.623.282,00	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.530.700,00	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.308.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	5.856.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	5.051.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100%	199.854.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100%	204.519.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.164.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.508.300,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.714.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.858.100,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.643.900,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.167.100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima		-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima		-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	161.332.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	164.986.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 jenis	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 jenis	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Bima	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang	100%	171.327.970,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Bima	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang	100%	387.903.700,00	

	Pemerintahan Daerah		kebutuhan kantor			Pemerintahan Daerah		kebutuhan kantor			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	130.476.100,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	188.482.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40.851.870,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	199.421.700,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100%	45.820.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100%	43.610.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	39.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	37.400.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	6.820.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	6.210.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100%	35.023.200,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100%	35.023.200,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	700 Pelaku Usaha	35.023.200,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	700 Pelaku Usaha	35.023.200,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	-	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	35.023.200,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	35.023.200,00	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%	134.564.100,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%	134.564.000,00	
	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1000 Pelaku Usaha	134.564.100,00	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1000 Pelaku Usaha	134.564.000,00	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 pelaku usaha	-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 pelaku usaha	-	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000 kegiatan usaha	-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000 kegiatan usaha	-	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 orang	-	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 orang	-	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	100.681.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	100.681.000,00	Pemutahiran sesuai Kemendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 perubahan atas kemendagri No.050-5889 tahun 2021
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku usaha	19.677.100,00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	19.677.000,00	Pemutahiran sesuai Kemendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 perubahan atas kemendagri No.050-5889 tahun 2021
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas	2000 kegiatan usaha	14.206.000,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas	2000 kegiatan usaha	14.206.000,00	Pemutahiran sesuai Kemendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun

			Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			2023 perubahan atas kemendagri No.050-5889 tahun 2021
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	459.100.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	84.867.500,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	120 pelaku usaha	459.100.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	120 pelaku usaha	84.867.500,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	jumlah dokumen LKPM Dalam Jaringan (Daring)	50 dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	jumlah dokumen LKPM Dalam Jaringan (Daring)	50 dokumen	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 pelaku usaha	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 pelaku usaha	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 kegiatan usaha	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 kegiatan usaha	-	
	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	459.100.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	84.867.500,00	Pemutahiran sesuai Kemendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 perubahan atas kemendagri No.050-5889 tahun 2021
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	100%	30.873.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	100%	55.069.400,00	

	PENANAMAN MODAL		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			PENANAMAN MODAL		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	30.873.400,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	55.069.400,00	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	30.873.400,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	55.069.400,00	
	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	4 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	4 dokumen	-	
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Dokumen IKM	4 dokumen	-	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Dokumen IKM	4 dokumen	-	

TABEL.2.4 (T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

DPMPTSP Kota Bima

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BIMA

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Keb		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Ind
1	2	3	4	5	6	7	8	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.409.312.791,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.749.752.091,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Persentase Penin Penunjang Urusa

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96.865.800,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	16.802.100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9.161.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.966.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.121.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.168.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	11.170.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	42.475.700,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Laporan	3.235.884.021,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.113.281.121,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.530.700,00	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	5.856.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan K Triwulanan/ Seme Koordinasi Penyus Bulanan/Triwulana
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100%	199.854.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Pe Perkantoran dan Prasarana serta F
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.164.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Kom Listrik/Penerangan Disediakan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.714.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Pera Kantor yang Dised
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.643.900,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Bara Penggandaan yan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima		-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	161.332.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan P Koordinasi dan Ko
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 jenis	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Meningkatnya ku Perlengkapan dan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Unit Peral Disediakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100%	171.327.970,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya pe menunjang kebut
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	130.476.100,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan P Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40.851.870,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan P Sumber Daya Air d

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100%	45.820.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	39.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	6.820.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100%	35.023.200,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	700 Pelaku Usaha	35.023.200,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	35.023.200,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%	134.564.100,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1000 Pelaku Usaha	134.564.100,00	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 pelaku usaha	-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000 kegiatan usaha	-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 orang	-	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	100.681.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku usaha	19.677.100,00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2000 kegiatan usaha	14.206.000,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	459.100.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	120 pelaku usaha	459.100.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	jumlah dokumen LKPM Dalam Jaringan (Daring)	50 dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	jumlah dokumen L (Daring)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha.	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan U yang Melakukan K Pemantauan Pelak
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 pelaku usaha	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usa Pembinaan Pelaks
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 kegiatan usaha	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan U yang Melakukan K Pengawasan
	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usahadari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	459.100.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan U yang Telah Dianali Profil dan Informas Dllakukan Inspeksi Evaluasi Penilaian Perizinan Berusaha
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%	30.873.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Penin Informasi Perizina Berbasis Sistem Berusaha Terinte yang Diolah, Dika
	Pengelolaan Data dan Informasi Perinaan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	30.873.400,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perinaan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Data dan Non Perizinan Be Perizinan Berusa Elektronik yang D Dimanfaatkan
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	30.873.400,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Data dan I Perizinan Berbasis Berusaha Terinteg Diolah, Dikaji dan I

	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	4 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Dokumen IKM	4 dokumen	-	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Bima	Jumlah Dokumen

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, pokok-pokok pikiran DPRD maupun stake holder lainnya belum ada karena Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2025 belum dilaksanakan.

Tabel. 2.5 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025
DPMPTSP Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan-kebijakan Nasional maupun Propinsi serta Program Prioritas tidak dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima karena pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh SKPD-SKPD teknis terkait kebijakan tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan di bawah ini.

3.2.1. Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.
3. Menjamin komitmen terhadap kesempatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan kedalam dokumen Renstra hingga penjabarannya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Perijinan dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima.
- b. Merencanakan Program dan Kegiatan Perubahan Renstra Tahun 2024 sampai tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan (SP) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan.
- c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima setiap tahunnya.

3.2.2. Sasaran

Sasaran strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strength), kelemahan (weakness) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Identifikasi faktor internal yaitu :

❖ *Kekuatan (Strength) :*

- a. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana
- c. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani perijinan dan non perijinan
- d. Peta Potensi investasi
- e. Kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP

❖ *Kelemahan (Weakness) :*

- a. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal
- c. Belum tersedianya potensi area logistik sebagai destinasi investasi

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

❖ **Peluang (Opportunities)**

- a. Penerapan SPIPISE dan OSS
- d. Eksistensi instansi diluar pemerintah kota untuk mendukung pelayanan perijinan dan pengawasan
- e. Pengembangan industri kerajinan tangan berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal.

❖ **Ancaman (Threats)**

- a. Adanya pengaduan masalah perijinan
- b. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan online
- d. Ketidaksesuaian kepemilikan perijinan
- e. Lemahnya daya saing industri kerajinan tangan berbasis produk kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP.

Pada sub bagian ini berisi Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Prioritas dan Sasaran
DPMPTSP Kota Bima

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi dan jumlah pelaku usaha	Realisasi Investasi	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi

4.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi dan jumlah pelaku usaha	Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
----	--	---	------------------------	--	---

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran PD
DPMPTSP Kota Bima

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
1	2	3	4
	Tujuan :	Indikator Tujuan :	
1	Meningkatnya pertumbuhan Investasi	1. Persentase Pertumbuhan Investasi	100%
2	Meningkatnya IKM terhadap Pelayanan Publik	2. IKM Pelayanan Publik	85 %
	Sasaran :	Indikator Sasaran :	
1	Meningkatnya investasi dan jumlah pelaku usaha	1. Realisasi Investasi	Rp. 200.000.000.000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM	2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	92,86 %

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah seperti disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Indikator Kinerja Utama PD
DPMPTSP Kota Bima

No	IKU	Indikator IKU	Target Kinerja IKU
1	2	3	4
1	Persentase Pertumbuhan Investasi	Realisasi Investasi	Rp. 200.000.000
2	IKM Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	92,86

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yaitu meningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Kota Bima yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi penanaman modal.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman modal

Kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan diantaranya dengan pengembangan Gerai Pelayanan Perizinan. Program ini mencapai realisasi anggaran sebesar 220%

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan diarahkan pada penanganan analisis Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menghitung capaian realisasi investasi dengan indikator Persentase realisasi investasi dengan target 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan diarahkan pada kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal

diantaranya melalui Kemitraan Antar Pelaku Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM, serta Pameran Investasi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi dengan ketentuan sasaran programnya adalah meningkatnya kerjasama investasi Penanaman Modal dengan penentuan target sebesar 100% dan capaian realisasi sebesar 255%.

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan diarahkan pada pengawasan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi, antar lain melalui Pemantauan Perusahaan, dan Penyelesaian

LKPM Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kota Bima dengan target 100% dan capaian kinerja 135%.

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
 - b. Prioritas pembangunan
 - c. Pencapaian SDGs;
 - d. Pengurangan kemiskinan;
 - e. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
 - f. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
 - g. Pencapaian IKU
 - h. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
 - i. Pengembangan wilayah miskin;
 - j. Dan sebagainya, dapat ditambahkan sesuai kondisi masing-masing.

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan

NO	Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PROGRAM/KEGIATAN
(1)		(2)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		DINAS PENANAMAN MODAL
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2	Jumlah dokumen RKA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Jumlah dokumen RKA-P	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Jumlah dokumen DPA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	Jumlah dokumen DPA-P	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Jumlah dokumen LKIP, LPPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Administrasi Keuangan
1	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3	Jumlah laporan keuangan semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
4	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	Administrasi Umum
1	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d.	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

f.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Jumlah kendaraan dinas yang layak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang terpelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Porsentase peningkatan nilai investasi		B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
g.	Jumlah Peta potensi Investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
1	Jumlah Peta potensi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan		C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
h.	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
3	porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
4	Jumlah Survey IKM	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan		D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
i.	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota
1	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
3	Peningkatan Realisasi Investasi melalui OSS dan LKPM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Dokumen hasil BAP Pengawasan		E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

j.	Porsentase realisasi investasi yang diterbitkan tiap tahunnya	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota
1	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - 3) Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - 4) Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yakni :
 1. Pendidikan dan kesehatan
 2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
 3. Ekonomi dan Pariwisata
 4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
 5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
 6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025, 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kota Bima

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BIMA

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.534.450.582,00		4.670.484.099,46				4.749.819.174,23
2.18.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	100%	4.224.926.482,00	100%	4.351.674.276,46	DAU		100%	4.458.601.169,42
2.18.001.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	100%	77.311.000,00	100%	79.630.330,00	DAU		100%	82.019.239,90
2.18.001.02.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	2 dokumen	16.348.000,00	2 dokumen	16.838.440,00	DAU		2 dokumen	17.343.593,20
2.18.001.02.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	10.153.000,00	1 dokumen	10.457.590,00	DAU		1 dokumen	10.771.317,70
2.18.001.02.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	5.611.000,00	1 dokumen	5.779.330,00	DAU		1 dokumen	5.952.709,90
2.18.001.02.01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	2.512.000,00	1 dokumen	2.587.360,00	DAU		1 dokumen	2.664.980,80
2.18.001.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	2.028.000,00	1 dokumen	2.088.840,00	DAU		1 dokumen	2.151.505,20
2.18.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kota Bima	2 laporan	9.679.000,00	2 laporan	9.969.370,00	DAU		2 laporan	10.268.451,10

	ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2.18.001.2.0 1.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 laporan	30.980.000,00	2 laporan	31.909.400,00	DAU		2 laporan	32.866.682,00
2.18.001.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Kota Bima	Laporan	3.511.582.282,00	Laporan	3.616.929.750,46	DAU		100%	3.725.437.642,97
2.18.001.2.0 2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	30 orang/bulan	3.392.623.282,00	30 orang/bulan	3.494.401.980,46	DAU		35 orang/bulan	3.599.234.039,87
2.18.001.2.0 2.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	12 dokumen	108.600.000,00	12 dokumen	111.858.000,00	DAU		12 dokumen	115.213.740,00
2.18.001.2.0 2.005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1 laporan	5.308.000,00	1 laporan	5.467.240,00	DAU		1 laporan	5.631.257,20
2.18.001.2.0 2.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	2 laporan	5.051.000,00	2 laporan	5.202.530,00	DAU		2 laporan	5.358.605,90
2.18.001.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	Kota Bima	100%	204.519.500,00	100%	210.655.085,00	DAU		100%	216.974.737,55
2.18.001.2.0 6.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	2 Paket	2.508.300,00	2 Paket	2.583.549,00	DAU		2 Paket	2.661.055,47
2.18.001.2.0 6.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12 Paket	16.858.100,00	12 Paket	17.363.843,00	DAU		12 Paket	17.884.758,29
2.18.001.2.0 6.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	12 Paket	20.167.100,00	12 Paket	20.772.113,00	DAU		12 Paket	21.395.276,39
2.18.001.2.0 6.004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Bima	-		-	-	DAU		-	0,00
2.18.001.2.0 6.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	25 laporan	164.986.000,00	25 laporan	169.935.580,00	DAU		25 laporan	175.033.647,40
2.18.001.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kota Bima	12 jenis	-	12 jenis	-	DAU		100%	-
2.18.001.2.0 7.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bima	3 unit	-	3 unit	-	DAU		3 unit	0,00

2.18.001.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	Kota Bima	100%	387.903.700,00	100%	399.540.811,00	DAU		100%	387.903.700,00
2.18.001.2.0 8.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	12 laporan	188.482.000,00	12 laporan	194.136.460,00	DAU		12 laporan	188.482.000,00
2.18.001.2.0 8.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	12 laporan	199.421.700,00	12 laporan	205.404.351,00	DAU		12 laporan	199.421.700,00
2.18.001.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	Kota Bima	100%	43.610.000,00	100%	44.918.300,00	DAU		100%	46.265.849,00
2.18.001.2.0 9.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	4 unit	37.400.000,00	4 unit	38.522.000,00	DAU		4 unit	39.677.660,00
2.18.001.2.0 9.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima	4 unit	6.210.000,00	4 unit	6.396.300,00	DAU		4 unit	6.588.189,00
2.18.001.2.0 9.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	1 unit	-	1 unit	-	DAU		1 unit	0,00
2.18.002	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Kota Bima	100%	-	100%	-	DAU		100%	-
2.18.002.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 dokumen	-	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
2.18.002.2.0 2.002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 dokumen	-	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	0,00
2.18.003	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Kota Bima	100%	35.023.200,00	100%	36.073.896,00	DAU		1 dokumen	0,00
2.18.003.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Kota Bima	1 dokumen	35.023.200,00	1 dokumen	36.073.896,00	DAU		1 dokumen	0,00
2.18.003.2.0 1.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 dokumen	-	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	0,00
2.18.003.2.0 1.003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kota Bima	1 dokumen	35.023.200,00	1 dokumen	36.073.896,00	DAU		1 dokumen	37.156.112,88
2.18.004	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Kota Bima	100%	134.564.000,00	100%	138.600.920,00	DAU		100%	142.758.947,60
2.18.004.2.0 1	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Kota Bima	1000 Pelaku Usaha	134.564.000,00	1000 Pelaku Usaha	138.600.920,00	DAU		Dokumen	142.758.947,60

2.18.004.2.0 1.003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Bima	30 orang	-	30 orang	-	DAU		30 orang	0,00
2.18.004.2.0 1.006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	1000 Pelaku Usaha	100.681.000,00	1000 Pelaku Usaha	103.701.430,00	DAU		1500 pelaku usaha	106.812.472,90
2.18.004.2.0 1.007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	25 Pelaku usaha	19.677.000,00	25 Pelaku usaha	20.267.310,00	DAU		30 orang	20.875.329,30
2.18.004.2.0 1.008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Bima	2000 kegiatan usaha	14.206.000,00	2000 kegiatan usaha	14.632.180,00	DAU		1000 kegiatan usaha	15.071.145,40
2.18.005	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Kota Bima	100%	84.867.500,00	100%	87.413.525,00	DAU		100%	90.035.930,75
2.18.005.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Kota Bima	1 Dokumen	84.867.500,00	1 Dokumen	87.413.525,00	DAU		Dokumen	90.035.930,75
2.18.0.0.0.0. 12.011	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen LKPM Dalam Jaringan (Daring)	Kota Bima	50 dokumen	-	50 dokumen	-	DAU		50 dokumen	0,00
2.18.005.2.0 1.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	50 Kegiatan Usaha.	-	50 Kegiatan Usaha.	-	DAU		50 pelaku usaha	0,00
2.18.005.2.0 1.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	210 pelaku usaha	-	210 pelaku usaha	-	DAU		210 pelaku usaha	0,00
2.18.005.2.0 1.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kota Bima	13 kegiatan usaha	-	13 kegiatan usaha	-	DAU		13 kegiatan usaha	0,00
2.18.005.2.0 1.006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan	Kota Bima	231 Kegiatan Usaha	84.867.500,00	231 Kegiatan Usaha	87.413.525,00	DAU		195 Kegiatan Usaha	90.035.930,75

		Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha									
2.18.006	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bima	100%	55.069.400,00	100%	56.721.482,00	DAU		100%	58.423.126,46
2.18.006.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bima	8 dokumen	55.069.400,00	8 dokumen	56.721.482,00	DAU		1 dokumen	58.423.126,46
2.18.006.2.0 1.001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bima	8 dokumen	55.069.400,00	8 dokumen	56.721.482,00	DAU		1 dokumen	58.423.126,46
	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	Kota Bima	4 dokumen	-	4 dokumen	-	DAU		1 dokumen	0,00
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Dokumen IKM	Kota Bima	4 dokumen	-	4 dokumen	-	DAU		1 dokumen	0,00

BAB. V

P E N U T U P

Sebagai uraian terakhir pada bab penutup Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2025 ini, disampaikan dengan kaidah pelaksanaan rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebaga berikut :

1. Sesuai Ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.
2. Dengan ditetapkannya Renja DPMPTSP Kota Bima ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkup DPMPTSP Kota Bima terikat untuk menjadikannya acuan dan arahan operasionalisasi dalam pelaksanaan Program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
3. Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima tahun 2025 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima tahun 2025 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan Renja ini.

Kota Bima, 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Bima,



H. DALU SUKARSANA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660704 198608 1 003